

SKRIPSI

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KOTA BUKITTINGGI**

(Studi Pada Puskesmas Nilam Sari Kota Bukittinggi)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

AFDALUL ZIKRI

1410111084

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK
VIII)**



Pembimbing:

Hj. Sri Arnetti, SH., MH.

Gusminarti, SH., MH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KOTA BUKITTINGGI**

(Studi Pada Puskesmas Nilam Sari Kota Bukittinggi)

**(Afdalul Zikri, BP 1410111084, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 75 halaman, 2018)**

ABSTRAK

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah untuk kesejahteraan rakyatnya, dan kesejahteraan adalah hak setiap Warga Negara Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang berbunyi : “.... Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Upaya mencapai kesejahteraan tersebut adalah membuka lapangan pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang layak disediakan pemerintah adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hak PNS adalah mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas. Pemerintah daerah Kota Bukittinggi selain memberikan gaji juga memberikan tambahan penghasilan kepada PNS Kota Bukittinggi yang sama halnya dengan tunjangan kinerja. Penulis menekankan kajian pada Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Studi Pada Puskesmas Nilam Sari Kota Bukittinggi) serta kendala dalam pemberian tambahan penghasilan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (*field research*) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian tambahan penghasilan belum berjalan dengan baik, permasalahan yang ditemukan secara yuridis adalah pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Kota Bukittinggi belum tercapai, dikarenakan dalam tujuan pemberian tunjangan tambahan penghasilan tolak ukur yang dipakai dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi belum diatur secara jelas sehingga tujuan pemberian tunjangan tambahan penghasilan tersebut tidak tepat sasaran. Sedangkan non yuridis adalah bahwa PNS di Puskesmas Nilam Sari tidak mengetahui tolak ukur penilaian dalam kualitas kerja dan penilaian kerja.

Kata Kunci: Penghasilan, Tunjangan Tambahan Penghasilan